



Bahasa dan Keadilan: Pengarusutamaan Gender melalui Budaya *Panginyongan*

Fatni Erlina

Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

E-mail: fatnierlina@iainpurwokerto.ac.id

Info Artikel: Diterima: 23 November 2022; Direvisi 12 November 2023; Ditsetujui: 13 Desember 2023;

Keywords

Banyumas;
Gender;
Justice;
Equality;
Panginyongan;

Abstract

Gender is an attribute attached to the distinction between the sexes, especially with regard to the division of roles. This study aims to determine whether cultural values in the relation of the locality of Panginyongan culture have relevance to the vision of gender mainstreaming. Panginyongan is a subculture of Javanese macroculture, but has several fundamental differences with Mainstream Java, such as the absence of a hierarchy in language and communication. Language is a representation of values that may have implications in other contexts, including gender issues. The writing of this article is an ethnomethodological study, which is a subjective approach, about the awareness, perceptions, and actions of individuals in their interactions with the social setting they occupy. The method used is a combination of field studies and literature. The article was written using a qualitative descriptive analysis. The results show that the value of language equality in the Panginyongan culture has a correlation with gender equality. Contextualization of gender equality values in Panginyongan culture can be realized if the actors are able to reproduce the culture. Cultural reform is carried out by: 1) raising the image of the Panginyongan language to be more authoritative, not extras and humor, 2) changing the philosophy of Panginyongan along with the empowerment of women as the core character, from being marginalized, and 3) revitalizing local figures who are knights, officers, openness, honesty, and wisdom (Bawor).

Kata Kunci

Banyumas;
Gender;
Keadilan
Kesetaraan;
Panginyongan;

Abstrak

Gender menjadi atribut yang melekat pada perbedaan jenis kelamin, terutama berkaitan dengan pembagian peran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai budaya dalam relasi lokalitas budaya *Panginyongan* memiliki relevansi dengan visi pengarusutamaan gender. *Panginyongan* merupakan subkultur dari makrokultural Jawa, tetapi memiliki sejumlah perbedaan mendasar dengan Jawa *Mainstream*, seperti tiadanya hierarki dalam bahasa dan komunikasi. Bahasa merupakan representasi nilai yang mungkin sekali berimplikasi pada konteks lainnya termasuk isu gender. Penulisan artikel ini merupakan studi etnometodologi, yakni suatu pendekatan subjektif, tentang kesadaran, persepsi dan tindakan individu dalam interaksinya dengan setting sosial yang ditempatinya. Metode yang digunakan adalah kombinasi antara studi lapangan dan kepustakaan. Artikel ditulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai kesetaraan berbahasa dalam budaya *Panginyongan* memiliki korelasi dengan kesetaraan gender. Kontekstualisasi nilai-nilai kesetaraan gender dalam budaya *Panginyongan* dapat diwujudkan apabila para pemerannya mampu melakukan reproduksi budaya. Reformasi budaya dilakukan dengan cara: 1) mengangkat citra bahasa *Panginyongan* menjadi lebih berwibawa, bukan figuran dan humor, 2) merubah filosofis *Panginyongan* bersamaan keberdayaan perempuan sebagai inti karakter, dari keterpinggiran, dan 3) merevitalisasi tokoh-tokoh lokal yang ksatria, perwira, keterbukaan, kejujuran, dan bijaksana (Bawor).

* Corespondensi Penulis: ✉ fatnierlina@iainpurwokerto.ac.id

How to Cite (APA Style):

Erlina, F. (2023). Bahasa dan Keadilan: Pengarusutamaan Gender melalui Budaya *Panginyongan*. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender dan Anak*, 5(2), 215-228. <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/2577>



PENDAHULUAN

Salah satu visi wacana gender adalah mengakhiri diskriminasi perempuan, yang ada dalam setiap kebudayaan. Hal ini hanya mungkin terjadi apabila tidak ada lagi kekerasan, perdagangan dan eksploitasi perempuan. Setiap manusia menjadi dapat lebih menghargai pekerjaan domestik seperti mengasuh anak dan pekerjaan rumah tangga. Perjuangan gender masih akan panjang selama masih ada praktik perdagangan orang, perburuhan migran, pekerja seks komersial, eksploitasi seksual, adopsi palsu anak, pengantin pesanan (*mail-order-bride*), industri pornografi, peredaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh. Semua fenomena di atas bila dilihat dari akar kulturalnya, berangkat dari tidak adanya keseimbangan antar pelaku-pelaku selama interaksi sosial berlangsung. Interaksi sosial yang paling intens terjadi misalnya dalam institusi keluarga. Bahasa dan cara berkomunikasi dapat menentukan seberapa keterbukaan, persamaan, kesetaraan dan keadilan terwujud melalui pembagian peran, akses terhadap sumber daya dan pengendalian keputusan yang terbangun.

Gender menjadi atribut yang melekat pada perbedaan jenis kelamin, terutama berkaitan dengan pembagian peran. Ada sejumlah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, tetapi perbedaan peran merupakan konstruksi sosial budaya yang paling mudah ditonjolkan. Setiap kebiasaan yang hidup dalam tradisi masyarakat bisa benar atau salah. Jika dikembalikan pada asas keadilan, konstruksi budaya ini belum tentu berpihak pada kelompok yang termarginalkan. Di sinilah letak isu gender memiliki fungsi untuk mengarusutamakan suatu nilai yang mungkin baru bagi masyarakat, tetapi mengacu pada prinsip kesetaraan. Sebagai contoh, hampir di semua kebudayaan, ada pembagian secara tidak langsung bahwa peran-peran publik dilakukan laki-laki, sedangkan peran domestik dilakukan perempuan. Meskipun kemampuan dan kesempatan tidak

selalu demikian. Akibatnya timbul suatu kerugian atau kesenjangan pada salah satu pihak. Budaya yang demikian telah membentuk suatu cara berfikir yang seakan-akan kodrati (alamiah) tentang hak-hak kewajiban, kuasa dan sumber daya. Kesetaraan pada ujungnya menentukan partisipasi dalam mengelola "kekuasaan", partisipasinya dalam menentukan keputusan, persamaan aksesnya terhadap politik dan ekonomi.

Panginyongan merupakan budaya yang hidup dalam komunitas *Banyumasan*. Komunitas ini dicirikan dengan penuturan bahasa *ngapak*, yang mendiami wilayah barat daya provinsi Jawa Tengah (Herusatoto, 2008). Salah satu ciri yang melekat dalam bahasa *Panginyongan* adalah *ngoko* tanpa stratifikasi, tidak sebagaimana lazimnya cara berbahasa pada masyarakat Jawa pada umumnya. Berbahasa tanpa *unggah-ungguh* menurut pakem keraton ini yang disinyalir sebagai nilai egaliterianisme. Budaya *Panginyongan* juga mengenal konsep *cablaka* yang artinya selalu berterus terang, apa adanya, *tanpa tedeng aling-aling*. Dalam konteks relasi sosial, budaya *Panginyongan* menjadi identik dengan nilai kesetaraan, yang diekspresikan melalui Bahasa. Makna kesetaraan dan keterbukaan ini jika diperluas merupakan modal penting agar pengarusutamaan gender lebih terkulturisasi. Namun belum banyak yang dapat merevitalisasi nilai ini dalam konteks sosial gender. Hingga kini, budaya *Panginyongan* memiliki karakter khusus yang otonom dari pengaruh budaya Jawa *Mainstream*, dan tetap eksis dalam dialek *ngapak* yang humoris, kritis, lugas dan tegas (Dadan, 2019). Egaliterianisme *Panginyongan* dapat menjadi salah satu alternatif atau setidaknya suplemen pewacanaan gender.

Dibutuhkan suatu kesadaran dalam menegakkan jenis keadilan ini, karena kesewenangan yang timbul tidak bersentuhan langsung dengan perangkat atau institusi, melainkan dalam individu dan keluarga. Pendekatan budaya diperlukan, karena sebagian besar rumusan undang-undang cukup menghukum pelaku, tetapi

tidak cukup melindungi korban dan saksi (Muflichah & Bintoro, 2009). Dengan uraian di atas, kajian ini bertujuan untuk mengetahui apakah lokalitas budaya *Panginyongan* memiliki nilai-nilai yang relevan dengan visi pengarusutamaan gender. Yang dapat berkontribusi dalam menggali dan mengenali nilai-nilai kesetaraan gender yang terkandung pada budaya *panginyongan*, baik secara eksplisit maupun implisit, serta menjadi alternatif strategi dan sosialisasi pengarusutamaan gender melalui Budaya *Panginyongan*.

METODE

Artikel ini merupakan studi Etnometodologi, pada etnis Banyumasan. Etnometodologi merupakan sebuah studi pada dunia subjektif, tentang kesadaran, persepsi dan tindakan individu dalam interaksinya dengan setting sosial yang ditempanya sesuai dengan pokok penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penulisan ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis dan digunakan untuk mengkaji suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya. Penelitian kualitatif ini disebut riset naturalistik, karena dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya, metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; dan disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya tidak bersifat kuantitatif. Sumber data penelitian ini, meliputi sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder berupa data kepustakaan, literatur-literatur dan karya ilmiah yang memuat informasi tentang budaya *Panginyongan*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kombinasi (*mixed research*) antara data lapangan (*field research*), dan literatur (*library research*). Penelitian lapangan dengan memotret secara langsung praktik budaya dalam konteks

keadilan gender masyarakat Banyumasan. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perempuan dalam Subsistem Kultur *Panginyongan*

Perempuan memiliki arti strategis dalam setiap program pembangunan. Namun dalam proses perencanaannya seringkali malah dan selalu diabaikan (Anwaruddin). Jika menyebut bahwa realitas adalah suatu produk budaya, fakta menunjukkan bahwa angka kekerasan perempuan di Banyumas masih pada tingkat memprihatinkan. Sampai dengan tahun 2020 indeks skala gender Banyumas selalu di bawah rata-rata regional Jawa Tengah maupun nasional (Puspita et al., 2019). Hal ini selaras dengan tingkat kemiskinan yang kurang lebih pada tingkat yang sama, di bawah rata-rata regional maupun nasional. Ruby Hardiati menyebutkan faktor ekonomi, budaya patriarhal, dan komunikasi masih mendominasi (Johny, 2010). Soetji Lestari, dkk. dalam Potret Pembangunan Manusia Berbasis Gender Di Kabupaten Banyumas Tahun 2015, dengan menggunakan pengukuran tingkat partisipasi politik dan pendapatan, menyebutkan bahwa indeks pembangunan dan pemberdayaan gender (IPG dan IDG) di Banyumas masih lebih rendah dibandingkan angka regional maupun nasional. Padahal Indonesia sendiri memiliki peringkat indeks gender yang cukup rendah di Asia (Lestari et al., 2019).

Banyumas sebagai subkultur meskipun bagian dari kebudayaan besar Jawa, seakan berdiri otonom sebagai “dunia lain” dari ekosistem Jawa.

Kebudayaan Jawa yang patriarkis dalam tata cara relasi yang sangat stratifikatif, menemukan anti tesisnya dalam kultur *Panginyongan*. Meski begitu tidak semua mozaik budaya *Panginyongan* menampilkan nilai kesetaraan perempuan secara bulat. Misalnya karakter *cablaka* dan *blakasutha* mengandung muatan nilai yang berbeda dibandingkan dengan budaya *Ronggeng*, *gembrengan* dan *gowok*. Kritik Sofa Marwah dan Tri Rini Widyastuti tentang subordinasi perempuan Banyumasan, dengan menyebutkannya tidak lebih dari pelengkap dan pelaksana tugas domestik seperti mempersiapkan sajian makanan dalam setiap ritual adat banyumasan. Bahkan adanya tradisi *Ronggeng* dan *gowokan* menampilkan sisi gelap kebudayaan *Panginyongan* yang paling eksploitatif bagi perempuan. Dari sini kita dapat mengerti bahwa nasib perempuan *Panginyongan* tidak berarti lebih baik dibandingkan kebudayaan Jawa yang lain yang katanya lebih feodalistik.

Sofa Marwah dan Tri Rini Widyastuti mengambil sampel peran perempuan dalam ritual adat. 1) Pada komunitas Bonokeling di Pekuncen, terdapat tradisi *unggah-unggahan* dan *perlon*. Kaum perempuan berperan sebagai penyedia makanan. 2) Tradisi *jaman jimat* di Kalisalak Kebasen, secara turun-temurun juru kunci diberikan hanya kepada laki-laki. Meskipun perempuan memiliki sedikit peran dalam tradisi *gubrak lesung*, dan *rengkong* dalam rumah adat *srotong* dan *tikelan*. 3) dalam Islam Aboge di Cikakak Wangon, kaum perempuan memiliki peran sama dengan laki-laki, yaitu sebagai pelaku upacara (Marwah & Widyastuti, 2015). 4) Sedangkan dalam Babad Pasir. Dikisahkan bahwa tokoh-tokoh penyebaran Islam didominasi laki-laki. Seperti Syeh Makdum Ali, Syeh Makdum Umar, Banyak Belanak, dan Banyak Geleh. Syeh Makdum Ali dan Syeh Makdum Umar adalah utusan dari Kerajaan Demak, sedangkan Banyak Belanak dan Banyak Geleh adalah Adipati dan Patih Pasirluhur pada masa itu (Priyadi, 2007). 5) Perempuan juga menjadi bagian penting menjadi demang di Pasir Luhur yaitu Demang Saratiman,

Demang Nur Hakim, Demang Maryam. 6) Di Gerduren Purwojati merupakan pusat kesenian *Lengger*. Masyarakat menghormati keberadaan penari *Lengger* sebagai penjelmaan roh leluhur, sehingga dihormati dan dimintai berkah (Marwah & Widyastuti, 2015).

Tidak banyak bukti sejarah lain yang menjelaskan secara langsung tentang pengaruh dan kesetaraan perempuan dalam kultur *Panginyongan*. Sofa Marwah menyebutkan bahwa perempuan dalam sejarah budaya Banyumasan lebih banyak mengalami subordinasi dan stereotip. Ia mencontohkan bagaimana dalam setiap ritual adat Banyumasan, aktor-aktornya selalu laki-laki, sedangkan perempuan hanya pelayan bagian belakang (*tiang wingking*) (Marwah & Widyastuti, 2015). Satu-satunya catatan yang mungkin relevan adalah tokoh Dewi Ciptarasa yang diceritakan dalam Babad Pasirluhur. Sosok Dewi Ciptarasa adalah perempuan yang dapat memikat pangeran Kamandaka putera mahkota kerajaan Pakuan Pajajaran. Karena adanya mozaik-mozaik kebudayaan *Panginyongan* yang paradoksal satu sama lain maka akan dijelaskan dibawah ini beberapa ikon budaya berkaitan dengan perempuan.

1. Dewi Ciptarasa: Perempuan Pemantik Perubahan

Karakter Dewi Ciptarasa dalam Babad Pasir Luhur, mewakili beberapa simbol budaya yang dapat ditafsirkan: Pertama, Simbol diplomasi politik. Bagi Pasir Luhur yang dihadapkan pada pilihan dilematis, antara berafiliasi pada Demak di satu sisi maupun Pajajaran di sisi lain. letak strategis berada pada batas keduanya menjadikan Pasir Luhur sebagai kekuasaan yang otonom tidak bergantung pada salah satu, tetapi juga harus menjaga hubungan politik yang bagi pada keduanya. Adanya sosok Dewi Ciptarasa mengelaborasi kesenjangan politik pada dua daerah tersebut. Kedua, Simbol aktor perubahan sosial. Dikisahkan karena Dewi Ciptarasa, maka putera mahkota Pajajaran yang sedang berpetualang enggan pulang ke kerajaannya, bahkan menetap di Banyumas dan berbalik

memeluk agama Islam. Simbol ini juga mengandung tafsir bahwa perempuan mampu berdiri membangun pengaruh, bahkan lebih berharga dibandingkan dengan megahnya sebuah kekuasaan. Ketiga, pesan menolak etnosentrisme, Kamandaka menikahi wanita *luaran* yang bukan berasal dari etniknya, tetapi tidak beraikbat buruk. Hal ini sama saja bentuk melawan pakem dan mitos yang diyakini bahwa menikah dengan etnis luar dapat berakibat buruk. Pasangan Banyakcatra dan Dewi Ciptarasa merupakan sebuah pesan persaudaraan universal yang lepas dan ikatan egosentrisme.

Boedioono Herusatoto menjelaskan bahwa jalur pertalian antara masyarakat Banyumas dengan dunia luar, Sebagian besar terjadi melalui jalur perempuan yang disebutnya *pangiwa* (Herusatoto, 2008). Hubungan keluarga dengan kerajaan-kerajaan Jawa adalah *pangiwa*, yaitu jalur perempuan atau ibu atau *matriarkis*. Melengkapi bukti kemampuan perempuan Banyumas yang diwakili Dewi Ciptarasa dalam menjalin hubungan dengan pembesar Sunda di bagian barat.

2. *Ronggeng* dan Refleksi Kemandirian Perempuan.

Ronggeng adalah seni pertunjukan tarian tradisional dengan iringan gending. Seni tari ini dianggap mempertontonkan komodifikasi tubuh perempuan karena menampilkan gerakan erotis dan *ketiban salur*. *Tiban salur* adalah semacam *doorprize* yang dipilih oleh penari dengan cara mengalungkan selendangnya. Penonton terpilih boleh berbuat apapun kepada sang penari, seperti menyentuh atau mencium. *Ronggeng* dalam novel Ahmad Tohari dijelaskan merupakan profesi yang *given*, bukan pilihan yang didasarkan atas sukarela, tetapi berdasarkan kewahyuan *indang*, dan bagi yang terpilih tidak berhak menolaknya. *Ronggeng* menampilkan sisi ironi kemanusiaan yang lain, karena dia tidak berhak menikah atau memiliki anak. Seluruh kehidupannya didekasikan sepenuhnya bagi profesi tersebut. Sebagian

Ronggeng memiliki pekerjaan lain sebagai *gowok*, akan di jelaskan di bawah.

Tokoh Srintil dalam Sastra Banyumasan karya Ahmad Tohari, digambarkan sebagai perempuan penari yang di satu sisi bangga dengan kedudukan istimewanya, namun juga mengemban stereotip sebagai wanita penghibur. Perempuan dengan profil demikian sayangnya membuktikan kemandirian secara ekonomi. Pelecehan yang dialami telah diterimanya sebagai konsekuensi dari profesi. Menjadi *Ronggeng* dalam keyakinan Sebagian masyarakat Banyumas, merupakan takdir, pilihan Tuhan, karena kejatuhan wahyu *indang* (Pudyadhita, 2012).

3. *Gowokan* dan Pendidikan seks.

Gowokan merupakan tradisi lama dalam masyarakat Banyumasan yang lebih mirip dengan pendidikan seks. Seorang anak laki-laki yang hendak menikah, oleh karena kedewasaan dan perkembangan psikologinya diragukan, akan melalui ritual *gowokan*. Yakni mengundang seorang perempuan *gowok* untuk mengajari tata cara berhubungan suami isteri. Durasi *gowokan* bisa antara satu sampai tiga hari. Selama itu tugas *gowok* memastikan bahwa calon pengantin laki-laki mampu melakukan nafkah batin secara sempurna sebagai seorang suami. *Gowok* dijelaskan dalam novel *Ronggeng* Dukuh Paruk biasanya menjadi profesi sampingan seorang penari *Ronggeng*, meskipun tidak setiap *gowok* adalah seorang *Ronggeng*. Pendidikan seks ini lebih pada Pendidikan praktik dan peragaan seks, bukan pendidikan seks sebagaimana lazimnya di masa modern, yang menekankan pada masalah etika sosial, kesehatan reproduksi dan psikologi.

4. *Lengger Lanang*; feminitas dan egaliterianisme laki-laki.

Lengger Lanang merupakan salah satu kesenian tarian tradisional yang crossgender (Hartanto, 2016). *Lengger Lanang* merupakan salah satu kesenian yang dianggap bernilai gender. Penari *Lengger* yang umumnya diperagakan perempuan, kecanduan

tikan, tubuh yang seksi dan gerakan yang gemulai merupakan daya tarik utama pertunjukan ini. Lalu apa jadinya jika segala kriteria *Lengger* yang sangat feminis tersebut diperankan laki-laki. Di sinilah letak keunikannya, rasa penasaran akan mengundang penonton. Langar *Lanang* umumnya hanya mampu dilakukan oleh penari yang sangat profesional, karena memiliki tugas ganda yakni melakukan Gerakan, sekaligus memerankan feminitas yang sebenarnya bukan tabiatnya. Fenomena kesenian crossgender kini semain berkembang, misalnya dalam pertunjukan ebeg, penari kuda lumping umumnya laki-laki, namun kini banyak juga diperankan perempuan. Begitu juga penari *Lengger* yang semula dilakukan perempuan diganti oleh peran laki-laki. Kepiwaian para penari *Lengger Lanang* tidak kalah gemulai dan memikatnya dengan perempuan. Begitu juga keterampilan memerankan penari kuda lumping, perempuan penarinya mencoba berlaku maskulin (gentleman). Mes-ki demikian fakta adanya crossgender dalam seni pertunjukan ini baru sekedar kepentingan komodifikasi, agar menarik bagi penonton.

5. Peang-Penjol Panggung Realitas Perempuan Banyumas

Peang-Penjol adalah drama humor dalam bentuk audio dengan dialog Banyumasan. Kadang disebut juga ketoprak Banyumas, karena selain peran dan bahasa yang digunakan, alat musiknya pun berbeda dengan gending Jawa pada umumnya. Topik yang diangkat biasanya adalah realitas keseharian masyarakat Banyumas, bersama masalah-masalah masyarakat kecil yang melingkupinya. Dalam cerita peang penjol salah satu tokohnya adalah Suliyah Ngudarasa. Tokoh ini memiliki karakter perempuan yang dimadu namun lebih banyak tampil sebagai sang bijak dan solutif. Karakter perempuan yang ulet, bekerja keras, menerima, namun seringkali tidak dihargai dan hasil kerja uletnya dibagi kepada suami. Tokoh ini setidaknya melukiskan profil perempuan *Panginyongan* yang tidak jauh dari realitas sebenarnya.

6. *Cablaka* Bahasa dan nilai kesetaraan

Cablaka adalah style dan ekspresi berbahasa, tanpa tingkatan hierarkis, tanpa *unggah-ungguh*, jujur lugas dan jelas. Melalui komunikasi yang *cablaka* dan *blakasutha*, kultur dan relasi yang dibangun memungkinkan bagi siapa saja termasuk perempuan *Panginyongan* untuk menyampaiannya secara setara dan terbuka pada siapa saja. Pola komunikasi ini membedakan dengan cara berbahasa dalam kultur Jawa mainstream, yang harus mengikuti tata cara etik yang bertingkat, dan apa yang dapat disampaikan bersifat selektif, pesan yang dianggap sopan, baik dan mranani penggalih (hal-hal yang membuat lawan bicara senang). Selektif artinya tidak semua pesan dengan kosakata atau diksi bisa disampaikan. Hal ini menjadi hambatan pembangunan nalar egaliter yang menafikan adanya “sisa-sisa” pesan yang terseleksi.

Beberapa mozaik budaya dalam uraian di atas dapat memberi kita sedikit gambaran tentang bagaimana perempuan dalam pergumulan tradisi Banyumasan, adakalanya mengalami subordinasi sebagaimana dalam ritual *bonokeling*, adakalanya mengalami eksploitasi dan komodifikasi dalam profesi *Ronggeng* dan *gowok*, namun pada bagian lain menempati kedudukan istimewa dan berwibawa sebagaimana kisah Dewiciptarasa dan Suliyah Ngudarasa. Semua mozaik kebudayaan ini adalah modal dalam mereproduksi budaya untuk mencapai nilai keadilan yang lebih egaliter bagi perempuan.

1. *Panginyongan* Sebagai *Local Wisdom Model Equality Gender*

Prinsip patronase (*patron client*) dalam struktur budaya, seharusnya menempatkan laki-laki sebagai pelindung dan pengayom perempuan. Namun keadaan ini tidak dapat diterima secara pasif, melainkan membutuhkan usaha aktif kedaunya. Membaca budaya selalu terkait dengan latar belakang sosial dan alam yang menyertainya. Hasil kompromi antara kebutuhan manusia dengan lingkungan ini yang melahrikan proses kreasi budaya.

Proses kreatif sering kita kenal sebagai cipta, rasa dan karsa manusia. Relasi laki-laki dan perempuan merupakan salah satu karya atas komunikasi antara manusia dengan lingkungan yang terjalin. Proses kreatif yang menjadi kebiasaan suatu ketika akan menemukan titik kesadaran terdalam, yang disebut sebagai intelektualisme budaya. Sejarah intelektual berkaitan dengan fakta mental (*mentifact*) yang menyangkut semua fakta yang terjadi pada jiwa, pikiran, atau kesadaran manusia. Fakta tersebut bersumber pada ekspresi yang terjadi dalam mental seseorang.

Cablaka atau *blakasutha* merupakan contoh proses mental masyarakat Banyumas yang universal. Istilah lokal tereduksi karena mentalitas manusia selalu merdeka dari batas-batas teritori. *Cablaka* dan *blakasutha* paling mewakili karakteristik *Panginyongan*, pada dasarnya bukan lagi fenomena budaya lokal, tetapi mengandung visi universal. (Priyadi, 2007). Terlebih apabila melihat, bahwa Jawa *Panginyongan* adalah bahasa “orang pinggir” yang populis (Khotimah, 2017), yang jauh dari kekuasaan dengan segala batasan-batasan etikanya. *Cablaka* beserta egaliterianisme yang universal tersebut tinggal diterjemahkan dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan. Relasi yang menunjukkan nilai egaliter dan keadilan.

Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Ketidakadilan gender umumnya masih terjadi di negara-negara berkembang. Kemajuan dan modernisasi dunia melalui sains dan teknologi belum cukup dibarengi oleh kesadaran tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesetaraan merupakan proyek pembangunan yang spesial dibandingkan dengan aspek-aspek pembangunan lainnya. Kesetaraan dapat memperkuat sendi-sendi masyarakat untuk mengakselerasi kemajuan, baik secara kultural maupun struktural. Mengarusutamakan kesetaraan gender merupakan pemberdayaan dan keberdayaan sosial. Pembangunan politik dan ekonomi

yang berbasiskan kepada kesetaraan dalam jangka panjang dapat merubah arah usaha mencapai kesejahteraan dan taraf hidup manusia.

Panginyongan, Bahasa dan Keadilan.

***Panginyongan*, Bahasa dan Keadilan**

Panginyongan berasal dari kata dasar “*inyong*” atau “*nyong*” dalam bahasa Jawa Banyumasan berarti aku atau saya. Banyumas secara administratif merupakan sebuah kabupaten di provinsi Jawa Tengah, secara geografis terletak di bagian Barat Daya. Banyumas kadang juga disebut Banyumas Raya yang merujuk pada wilayah eks karisedenan yang meliputi kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen (akronim: MasBarLingCaKeb). Secara kultur, bila merujuk pada penggunaan bahasa Banyumasan, maka *Panginyongan* tidak lagi terbatas secara administratif, tetapi juga beberapa wilayah sekitar seperti: Jawa Barat bagian timur seperti Cirebon, Ciamis, Jawa Tengah bagian barat: Tegal, Brebes, dan Pemalang. Daerah-daerah ini berada diperbatasan Jawa Barat, maka secara etnologis sering disebut juga sebagai entik persilangan Jawa-Sunda.

Menurut Supadjar, bahasa Jawa dialek Banyumasan merupakan bahasa Jawa paling tua, disebut Jawadwipa, yang sudah ada sebelum Aji Saka (78 M). Jawadwipa salah satu cirinya adalah pengucapan huruf ‘a’ yang tetap dibaca ‘a’ bukan ‘o’. Pengucapan ‘o’ merupakan bahasa Jawa bandhekan yang usianya lebih kontemporer (Dadan, 2019). Menurut Yusmanto Jawa Banyumasan memiliki ciri-ciri khusus: (1) berkembang secara lokal di wilayah sekitar Banyumas; (2) lugu dan terbuka; (3) tidak banyak gradasi unggah-ungguh; (4) digunakan sebagai bahasa Ibu oleh sebagian besar masyarakat Banyumas; (5) mendapat pengaruh bahasa Jawa kuno, Jawa tengahan, dan bahasa Sunda; (6) pengucapan konsonan di akhir kata dibaca dengan jelas; (7) pengucapan vokal a, i, u, e, o dibaca dengan jelas (Dadan, 2019).

Panginyongan merupakan bahasa Jawa yang beroperasi dalam penuturan ngapak berupa logat

khas Banyumasan, dan bersifat *cablaka* (terus terang, apa adanya, tanpa tedeng aling-aling). *Panginyongan* dengan ngapak dan *cablaka* telah membedakannya dengan feodalitas struktur hierarkis Jawa pada umumnya, yang adhi luhung. *Panginyongan* menjadi istilah yang digunakan masyarakat lokal Banyumas guna mengidentifikasi seseorang sebagai bagian dari komunitas mereka, (framing in group feeling). Ketika seseorang dianggap telah menjadi bagian dari mereka akan disebut sebagai “wonge dhewek” atau orang kita. Wongo dhewek merupakan lawan dari istilah “wong liya” yang artinya orang lain, the others atau liyan (Nugroho, 2016).

3. *Cablaka-Blakasutha* Akar Egalitarianisme: Dari Bahasa Menuju Peradaban

Sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa budaya *Panginyongan* merujuk pada mozaik-mozaik nilai dan budaya yang kompleks. Diantara mozaik-mozaik tersebut kadang tidak mencerminkan nilai yang tunggal sebagai representasi tunggal. Sebaliknya ada beberapa nilai yang paradoksal. Misalnya bagaimana *Ronggeng* dan *gowok* sebagai praktik kultur yang eksploitatif terhadap perempuan, berbeda dengan konstruksi bahasa yang terbuka apa adanya tanpa stratifikasi yang “berlebihan”. Struktur bahasa yang sederhana mencerminkan kultur egaliter, jujur dan terbuka memungkinkan terjalinnya proses komunikasi yang intens antar pemeran dalam keluarga.

Nasib bahasa banyumasan hampir sama dengan perempuan banyumasan sendiri, termarginalisasi dari central biner (Khusnul Khotimah, 2017). Kategorisasi ini tidak berlebihan, mengingat, penempatan bahasa ngapak sebagai entitas kultural yang sejajar dengan bahasa Jawa bandhek/ gandhek. Hubungan keduanya lebih mirip, Jawa keraton itu pusat sedangkan Jawa *Panginyongan* itu pinggiran bahkan dunia lain. Pembagian ini bukan lagi sekedar pemisahan kami dan mereka (*in group-out group*), tetapi kami yang beradab dengan mereka yang kasar, kami yang ma-

yor dengan mereka yang minor, kami yang normal dengan mereka yang abnormal.

Rasa keterpinggiran ini mungkin secara tidak sadar telah membentuk suasana psikis sosial yang inferior/ minder/ ghalib ini pada dasarnya sudah terjadi sekian waktu. Banyumas yang jauh dari pusat kekuasaan, baik kerajaan-kerajaan Islam di timur (Demak, Pajang, dan Mataram) maupun hindu di barat (Pajajaran) bisa dikatakan tidak tersentuh dengan dinamika pergolakan kekuasaan. Trend bahasa yang berkembang dan konstruksi struktural bahasa yang sedang dibentuk untuk menopang suatu kekuasaan, sedikit sekali pengaruhnya bagi Banyumas. Hal ini secara politik kultural juga menandakan otonomi dan independensi bahasa Banyumas, yang tetap otentik, orisinal dan terjaga, karena tidak perlu berkiblat pada salah satu dari kedua sumbu kekuasaan. Dengan kata lain secara kultural komunitas *Panginyongan* tidak perlu terlalu ekspektatif mengikuti euphoria perubahan termasuk di dalam berbahasa yang telah mengalami perkembangan (bahkan bahasa jawa sampai lima tahap). Diantara persaingan timur (Demak-Mataram-Islam) dan barat (Pajajaran-Sunda-Hindu), Banyumas mungkin tampil menjadi sintesa atau kolaborasi keduanya. Topik peradaban bukan bertumpu pada kebaruan semata, tetapi yang lebih penting adalah nilai kemanusiaan. Bagaimana mengupayakan suatu subkultur yang mandiri, tidak tergantung pada dunia luar termasuk hegemoni kekuasaan, saling menghargai, egaliter duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Keadilan gender adalah salah satu standar moral dalam pengembangan peradaban manusia.

4. *Panginyongan* Dan Subordinasi Bahasa

Kebangkitan bahasa Banyumasan dapat terjadi berbarengan dengan pengakuan penuturnya untuk menjadikannya identitas komunal, sekaligus penggunaannya dalam budaya pop. Sebutlah acara radio Curanmor, yang tidak saja membuat orang tertarik dan suka tetapi menjadi ingin tahu dan mengenali. Sayangnya sekali lagi bahasa *Pang-*

inyongan sebagaimana latar belakang keterpinggirannya tetap saja masih tampil sebagai bahasa kerakyatan, terkesan tidak seperti kewibawaan bahasa-bahasa penguasa. *Panginyongan* akhirnya hanya tumbuh dalam kerangka jenaka dan humor (guyonan, banyolan, dagelan). Selain Curanmor ingat pula dialog “peang penjol” di medium 1980-1990an (Khristianto, 2012). Dalam budaya pop media, karakter Banyumasan terlanjur dipersepsikan dikonstruksi dalam citra sebagai pihak yang lugu, polos, konyol, tiang wingking (orang pinggiran bukan). Bahasa kerakyatan (jelata) karena hanya diperankan dalam karakter lawak, atau figuran pembantu dalam sinetron. Media ini yang disinyalir memberi kontribusi kuat inferior kompleks identitas *Panginyongan*. Padahal tokoh-tokoh heroic, berwibawa dan bijaksana mungkin sebagaimana subkultur lain juga ada di komunitas *Panginyongan*. Budaya *Panginyongan* mengalami kenyataan subordinasi oleh komunitas lain yang lebih dominan. Adoh ratu pedek watu (jauh dari kekuasaan tetapi dekat dengan batu sebagai simbol alam) Sebaliknya karakter ksatria, perwira (*gentleman*) yang menjadi trade mark justeru tenggelam.

Pusat dan pinggir bukan lagi persoalan letak atau posisi tetapi fungsi dan kuasa. Maka yang lebih tepat proses ini disebut eminggiran (*marginalisasi*) dan kepusatan (*mainstream*). Hegemoni oleh pusat terhadap pinggiran terjadi dalam kontestasi media, politik, sosial, ekonomi, budaya dan barangkali juga dalam wacana. Bukti paling nyata adalah subordinasi Jawa gandhekan terhadap jawa *Panginyongan*. Peminggiran dipersepsikan juga perbedaan antara kekuasaan dan rakyat, antara bisnis dan agraris. Kesulitan menjaga identitas di suatu tempat sama artinya sulit mengkonstruksi nilai pada budayanya (Khusnul Khotimah, 2017). Proses citra dan penerimaan sama pentingnya. Komunitas *Panginyongan* musti mewujudkan Kembali citra yang merepresentasikan karakterstik nilainya, misalnya karakter ksatria (pemberani), perwira (mandiri), dan bawor (bijaksana). Peming-

giran suatu bahasa bukan juga mengenai jumlah mana yang mayoritas atau minoritas. Faktanya penutur basa jawa *Panginyongan* diperkirakan mencapai dua belas juta orang, angka yang sebenarnya cukup besar (Rokhman et al., 2021).

Kurikulum pendidikan nasional memiliki muatan lokal yang biasanya berisi pelajaran bahasa daerah. Ironisnya bagi masyarakat *Panginyongan* pelajaran yang disajikan ini bukan bahasa lokal, melainkan bahasa Jawa Ajisaka ala keraton. Bahasa Jawa keraton dan bahasa Jawa *Panginyongan* memiliki perbedaan kentara, kalau malah tidak disebut merepresentasikan rivalitas budaya. Bahasa keraton sejak munculnya telah melalui lima kali fase perubahan, dan merepresentasikan struktur feodal keraton. Sedangkan Jawa Banyumasan ada baru sekali tahap mengalami penyempurnaan (Herusatoto, 2008).

Bentuk subordinasi ini terlihat jelas ketika masyarakat penutur Jawa keraton mendengar langsung perbincangan Jawa ngapak atau Banyumasn. Rekasi mereka akan tersenyum, karena asumsinya lucu dan lugu, sebagaimana karakter humor yang dicitrakan media. Ngapak sudah pasti lawak, humor, dagelan, dan banyolan. Masalah mental *Panginyongan* dalam berbahasa ini, bukan semata berangkat dari persoalan minder (*minderwardigheid*) atau sikap inferiori penuturnya, tetapi juga penerimaan yang lahir dari persepsi mula tentang apa dan bagaimana objek itu ditafsirkan. Objek bahasa yang terlanjur dipersepsikan sebagai kelompok pinggiran yang tidak sejalan unggah-ungguh feodal keraton dianggap tidak atau kurang beradab, kurang etik dan kurang estetik. Persepsi orang lain terhadap bahasa *Panginyongan* dengan demikian terpengaruhi juga oleh sistem interaksi sosial politik. Selain itu juga dianggap tidak romantis tidak memiliki kreasi simbol-simbol kata dan falsafah yang sarat makna sebagaimana karakter Jawa keraton. Marginalisasi terhadap perempuan dari sisi bahasa lebih terasa karena ujaran “ayu-ayu ngapak” (cantik tetapi ngapak).

Bahasa merupakan stereotip dan mengalami makna konotatif negatif. *Panginyongan* memang seharusnya dapat berdiri mandiri, tidak condong ke timur (Demak, Pajang, Mataram), ataupun ke barat (Pajajaran). Posisi ini melahirkan entitas politik dan identitas kultural yang berdiri di atas kaki sendiri. Bahasa merupakan alat penyampaian pesan kepada orang lain, oleh Chaer (1994, p.71-81) dibedakan jenis-jenis perbedaan bahasa menjadi empat: 1) genetis yaitu bahasa yang diturunkan secara genealogis (berdasarkan keturunan) 2) tipologi yaitu berdasarkan kesamaan tipe bahasa seperti bunyi, dan morfem. 3) areal yaitu berdasarkan wilayah. 4) sosiolingua yaitu berdasarkan nilai bahasa itu, nampak elit keren dan trendy atau tidak (Pawestri, 2020).

Bahasa Jawa *Panginyongan* secara genetis berakar pada sumber yang paling original yaitu bahasa kawi atau Jawadwipa, secara tipologi memiliki kelebihan jelas dan lugas, secara areal terkumpul pada suatu wilayah dengan cakupan yang luas, dan secara sosiologis terlanjur memiliki nilai humor. Keadaan ini merupakan kelebihan dan kekurangan tersendiri, bergantung pada kemampuan mereproduksi citra dan eksistensinya. Acara pertunjukan dan media yang terlanjur telah andil: peang-penjol (audio), Curanmor (radio, mp3), cekakak kartun Banyumasan (televisi), bocah ngapak ya (televisi, youtube), @koplak story, dan @nikikula (youtube). Semua platform media yang mengangkat acara diatas bergenre humor. Meskipun secara psikososial publik nampak sangat menerima acara-acara di atas karena humor Banyumas bersifat halus, tidak dengan merendahkan orang lain dan berawal dari keluguan.

2. Bahasa Sebagai Karakter Utama Subkultur *Panginyongan*

Mengidentifikasi diri sebagai komunitas yang egaliter melalui wacana bahasa, bukan berarti menafikan keberadaan *Ronggeng* dan pernak-pernik subordinasi kultur lain, karena aspek negatifnya. Bahasa lebih mewakili sebagai karakter

Panginyongan, karena *Ronggeng* atau tayub atau tledhek atau *Lengger* bukanlah ciri khusus tradisi *Panginyongan*. Kesenian ini juga ada di daerah lain. Ditegaskan oleh Supriyadi bahwa inti pokok budaya Banyumasan memanglah pada cara berbahasa yang *cablaka* dan *blakasutha*.

Karakteristik *Panginyongan* oleh priyadi diklasifikasikan menjadi empat susunan. dari karakter terdalam sampai terluar: 1) karakter asli (biasanya diwakili oleh kelompok yang tidak terlalu bersentuhan dengan duni luar), 2) karakter para legenda, 3) karakter historis, misalnya babad pasir luhur, dan ke 4) karakter *Panginyongan* pada umumnya (Priyadi, 2007). Bahasa adalah subsistem kebudayaan yang mengandung pola-pola mental (Suhardi, 2013). Sebagaimana diketahui, bahwa bahasa Jawa (keratonan sebagai mayoritas) dalam penggunaannya memiliki banyak kosakata yang bertingkat-tingkat. Tingkatan ini disesuaikan pada siapa pembicara (komunikator) dan lawan bicara (komunikasi atau audiens). Misalkan komunikasi kepada lawan bicara yang berusia lebih tua, yang digunakan adalah tingkatan krama inggil. Jika sebaya namun belum terlalu akrab artinya masih ada batasan, menggunakan tingkatan krama lugu. Jika sebaya dan akrab yang digunakan adalah tingkatan ngoko lugu dan untuk yang lebih muda menggunakan ngoko alus. Di atasnya lagi dalam kesusastraan tingkat tinggi masih ada tingkatan kedaton atau bagongan. Berbeda dengan bahasa Jawa *Panginyongan* umumnya lebih sederhana dan hanya menggunakan tingkatan ngoko atau ngoko andhap, tanpa disertai unggah-ungguh (tingkatan ekspresi berkomunikasi). Dengan demikian bila dicermati, bahasa *Panginyongan* disebut egaliter bukan karena tidak adanya tingkatan. Hanya tingkatan ini lebih sederhana, dan ekspresi berbahasanya tidak dengan cara unggah-ungguh. *Panginyongan* menggunakan krama (tingkatan) sangat sederhana hanya krama lugu. Krama (tingkatan lebih tinggi) tidak hanya ditujukan untuk lelaki (suami) tetapi juga kepada orang yang lebih tua, orang yg dihormati, dan orang yg baru dike-

nal. Dalam hemat penuturnya, *Panginyongan* bahasa adalah bahasa hanya alat penyampai pesan, ia terbatas pada apa diucapkan tidak perlu ekspresi atau mimik berlebihan.

Penyebutan egaliter disini bukan merujuk pada ada atau tidaknya struktur feodal yang mengitari, namun lebih pada kejujuran dan keakraban dalam pola komunikasi. Tidak menganggap lawan bicara sebagai pihak yang sangat jauh batasannya. Disebut lugas karena jelas tidak memainkan pitch atau power harus ditekan pada bagian tertentu, atau dilepas pada bagian yang lain. Pengucapan bahasa Banyumasan relative sama dari awal sampai akhir, bahkan cenderung keras sehingga banyak yang menganggapnya kasar.

Bandingkan dengan falsafah blangkon Jawa (penutup kepala pria Jawa tradisional) dengan bentuk gulungan di bagian belakang. Bentuk ini mengisyaratkan pola hubungan “manis didepan”, tetapi dengan misi terkumpul di belakang. Blangkon diakui sebagai perlambang pola relasi yang memiliki maksud tersembunyi. Dalam konteks komunikasi sama artinya dengan berbicara dalam bahasa simbolis, untuk menjaga perasaan dan menjadikan nyaman di hadapan komunikan. Bahasa yang “tidak seutuhnya” ini kadang harus mengorbankan kejujuran, agar terkesan baik dengan istilah-istilah bersayap yang menyiratkan lebih banyak makna dan maksud lain. simbol-imbol tradisi seperti ini sanbat masyhur di kalangan masyarakat luas, yang tidak dapat diikuti oleh wong *Panginyongan*. Para *Panginyongan* tidak memerlukan pola hubungan yang se-rumit demikian karena tidak terhubung dengan jarring-jarring kepentingan. Jadi yang dibicarakan memanglah inti pesan, bukan simbol pesan. Ini yang disebut *cablaka*, sebuah keterbukaan dan kesetaraan. *Cablaka* artinya terus terang, mengungkapkan sesuatu tanpa sungkan. *Blakasutha* berarti terbuka tidak ada yang ditutup-tutupi atau dikaburkan. *Thok melong* artinya utuh tidak ada makna lain tersisa atau tidak tersirat. Tanpa tedheng aling-aling artinya tidak ada maksud tersembunyi lain,

bukan merupakan bahasa simbolis dengan makna tidak langsung.

Arti inyong adalah aku (dengan makna terendah) hampir mirip dengan hamba yang artinya juga aku, tetapi aku disini sebagai aku yang hamba, hamba adalah tingkatan manusia rendah yang bahkan tidak memiliki kemerdekaan, seperti arti hamba sahaya (budak). Hampir memiliki kemiripan arti juga dengan istilah kawula artinya juga aku dalam tingkatan paling rendah, Misalkan kawula alit artinya aku yang hanya orang kecil. Inyong adalah bukti kesederhanaan, tanpa upaya merebut eksistensi orang lain, karena menempatkan dirinya pada bagian terendah sehingga tidak ada yang lebih rendah lagi, tidak ada tempat lain lagi yang sama atau lebih rendah, maka lawan bicara otomatis memiliki kedudukan di atasnya.

Bahasa Jawa keraton dikenal bersifat simbolik, satire atau sindiran, unggah ungguh, dan banyak mengandung intrik. Ngapak adalah lawan dari bandhekan. Basa jawadwipa telah ada sebelum ajisaka 78 m. bahasa Jawa *Panginyongan* merupakan antitesa kramalugu atau kramantara yaitu kramainggil. Bahasa Jawa bandek telah mengalami perubahan improvisasi agar terdengar lebih baik (suitable). Dalam pandangan masyarakat *Panginyongan* hal itu hanyalah polesan, gemagus, kemayu yang dapat mengalihkan pesan pokoknya. Jawa *Panginyongan* yang berusia lebih tua, bisa disebut originalitas yg istimewa, tetapi dalam kecamata dinamika bahasa yang sarat akan serapan baru, hal itu bisa saja dianggap kejumudan. Bahasa Jawa ngapak atau banyumasan juga kadang disebut Jawadwipa atau jawa kawi. yang belum terkontaminasi serapan sansekerta. Kawi artinya mula, atau kawitan artinya permulaan, sangat wajar apabila penuturnya menyebut diri lebih awal atau asli. Sama halnya seperti bahasa yang otonom, kebanyakan sastra Banyumasan juga jauh dari puseran kekuasaan. Sastra Banyumasan yang banyak diwakili dalam karya-karya Ahmad Tohari menampilkan realitas kerakyatan, bukan intrik politik

dan kekuasaan. Meskipun banyak mozaik budaya yang sejujurnya erendahkan perempuan.

1. Reproduksi Kebudayaan Untuk Keadilan: Perempuan *Panginyongan* Menghadapi Konflik Peran

Manusia memiliki kemampuan kultural sehingga ia mampu mewujudkan suatu konstruksi linguistik. Bahasa ngapak yang dianggap kasar oleh sebagian kalangan merupakan suatu konstruksi tersendiri yang juga harus dipahami dalam aspek kultural (Widianingsih Rindha, 2019). Status kultural tidaklah bersifat permanen, ia mungkin sekali berubah seiring berjalannya waktu. Ada kalanya suatu budaya yang sebelumnya dinilai prestis dan elit, suatu ketika menjadi pasaran. Menurut Rindha, komunitas *Panginyongan* memiliki karakter: a) Sabar lan narima (sabar dan menerima apa adanya dalam kehidupan kesehariannya), b) ksatria (jujur, berkepribadian baik, toleran, rukun, suka membantu orang lain, mementingkan kepentingan bersama), c. Cancudan (rajin dan cekatan), dan d. *Cablaka* (lahir batinnya terbuka terhadap pertimbangan yang matang atas apapun yang diucapkannya (Widianingsih Rindha, 2019).

Modal kultural untuk mencapai keadilan dan kesetaraan adalah bahasa *blakasutha*, *cablaka*, *thokmelong*, tanpa tedheng aling-aling. Masalahnya secara ekstern eksistensi bahasa *Panginyongan* mengalami peminggiran terutama oleh bahasa Jawa keraton. Namun secara instrinsik filosofis yang terkandung dalam konsep budaya tersebut sangat relevan menjadi pedoman diri yang memiliki nilai unggul. Suatu tradisi dapat mengalami pergeseran posisi dari produsen budaya (*muntij ats-tsaqafi*) menjadi produk budaya (*muntaj ats-tsaqafi*). Dalam posisi produk budaya pelaku menjalani sebuah budaya secara pasif hanya menerima. Sedangkan dalam posisi sebagai produsen budaya, dia terlibat aktif mempertimbangkan baik dan buruk tata pemikiran perilaku dan sikap yang hendaik menjadi kebiasaannya. Sedangkan arti reproduksi budaya artinya proses revitalisasi menjadikan

fungsi yang lebih luas, dengan menggali lebih banyak makna dari tradisi yang dijalani, tanpa perlu membuat sesuatu yang baru. Disinilah kerangka aksi pengarusutamaan gender melalui budaya *Panginyongan* berusaha membebaskan dari mitos menjadi logos dan etos.

Bentuk-bentuk reproduksi budaya dapat kita ambil contoh, misalnya revitalisasi dari idiom "*mikul dhuwur mendem jeru*" yang dalam makna lama berarti berusaha sekuat tenaga menjaga kehormatan apapun yang terjadi harus terlihat baik di luar, dirubah penekannya menjadi kebersamaan, baik dan buruk direngkuh bersama. Berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Nilai budaya *Panginyongan* demikian terkesan lebih bernilai dibandingkan idiom yang sama dimaknai dalam falsafah Jawa keratonan. Contoh yang lain "*kere mung-gah bale*" makna sebelumnya adalah rasa minder, orang rendahan tidak seharusnya memimpikan derajat yang tinggi. Sikap inferior semacam ini dapat dirubah menjadi kelapangan mensyukuri keadaan sekaligus memaksimalkan potensi yang ada tanpa harus melihat orang lain yang kebetulan kehormatannya lebih tinggi. Idiom "*aja nggege mangsa*" atau curi start memulai sebelumnya direvitalisasi menjadi merencanakan sesuatu secara matang. Dalam setiap usaha dan perencanaan segalanya harus dipersiapkan dengan baik, dan bukan berarti takut melangkah (*defensif*), atau lambat bergerak sampai berputar mundur (*regresif*). Idiom "*Ora kuwat ndrajad*" yang dalam makna lama diartikan sebagai tidak perlu memiliki cita-cita tinggi, diubah sehingga menjadi keyakinan bahwa masing-masing manusia memiliki takaran yang belum tentu, sehingga menjadi pemicu agar berpikir jauh, berjiwa besar dan bercita-cita tinggi.

Reproduksi budaya pada bagian yang lain adalah merevitalisasi profil karakter. *Cablaka* dan *blakasutha* telah menempatkan komunitas *panginyonan* secara subordinat sebagai kelompok pinggiran, rendahan, dagelan. Padahal sifat yang melekat pada tokoh-tokoh Banyumas juga bernilai budaya tinggi. Misalnya istilah kota satria, kota

perwira dan tokoh Bawor. Reproduksi ini sangat perlu untuk dapat mengarusutamakan keadilan gender.

Karakter Bawor. Takoh Bawor menjadi ikon Banyumas hanya ada dalam mitologi wayang purwacrita, lebih populer dalam pakeliran wayang Banyumasan. Ini yang menjadi alasan kenapa Bawor adalah ikon Banyumas. Padahal ikon ini baru ditetapkan pada 1988 pada saat bupati Djoko Soedantoko (Hidayat, 2019). Tidak ada alasan yang lebih mendasar, kecuali memang Bawor yang sederhana mencerminkan kehidupan wong *Panginyongan* yang sederhana pula. Sayangnya dalam wayang keratonan, tokoh Bawor adalah peran Bangong anak semar, salah satu dari punakawan yang konyol dan jenaka, hanya sebagai abdi, bukan pemimpin. Hanya tampil ketika momen gara-gara. Pemilihan ikon ini secara tidak langsung juga turut membentuk stereotip komunitas *Panginyongan*. Reproduksi budaya perlu dilakukan dengan tidak menonjolkan kesederhanaannya, tetapi karakter lain seperti Tangguh, ahli strategi, kreatif dan tidak pernah kehabisan cara, serta patuh kepada Dewa (Tuhan).

Karakter Ksatria. Satria adalah sebutan kota Purwokerto yang artinya pahlawan. Banyak tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Purwokerto sehingga julukan ini yang diambil. Reproduksi budaya yang seharusnya diangkat adalah jiwa pemberani, mau berkorban.

Karakter perwira. Perwira pernah menjadi slogan kabupaten Purbalingga karena adanya tokoh besar Jenderal Soedirman yang lahir disana. Tokoh ini memiliki sifat perwira, pemberani dan berjiwa besar. Meski secara formal slogan ini baru, tetapi secara tidak langsung kultur *Panginyongan* mengindikasikan karakter perwira. Misalnya sifat berani bersusah payah meraih cita-cita atau usaha, tidak suka sambat atau mengadu, dan tidak suka merepotkan orang lain.

Suplementasi dari bawah bersifat akar rumput, bersamaan dengan reformasi budaya serta perubahan mental (*mentalfact*) adalah strategi budaya

untuk mengarusutamakan keadilan gender. Keterbukaan, kejujuran dan kesalingbersamaan telah menjadi rumus paling umum bagi relasi perempuan, sebagai prinsip hidup dan dasar pembangunan kebudayaan.

KESIMPULAN

Dari uraian seluruh penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya *Panginyongan* memiliki kontribusi secara tidak langsung terhadap pengarusutamaan gender. Beberapa unsur budaya yang bernilai subordinative antara lain *Ronggeng*, *gowok* serta beberapa upacara adat yang hanya memerankan perempuan sebagai *tiang wingking*. Sedangkan unsur yang mendukung dan paling pokok adalah *cablaka* dan *blakasutha* dalam perluasan maknanya di luar konteks bahasa sebagai karakter inti subkultur *Panginyongan*. Unsur pelengkap lain adalah karakter Bawor, satria, dan perwira.

Kontekstualisasi nilai-nilai kesetaraan gender dalam budaya *Panginyongan* diwujudkan melalui pembagian peran yang merata baik dari sisi aktifitas, akses maupun kontrol. laki-laki dan perempuan dalam kultur *Panginyongan apa-apane bareng ben kepenak kabeh* relative tidak mengandung tingkatan dan kultural yang berarti. Stratifikasi bahasa tidak terlihat ketika berkomunikasi, tidak menggunakan bahasa *krama inggil* tetapi menggunakan *ngoko* biasa.

Kajian ini dapat membuka keberlanjutan fokus visi pengarusutamaan gender pada nilai budaya yang berkearifan lokal dan relasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartanto, S. I. (2016). Perspektif Gender Pada *Lengger Lanang* Banyumas. *Pantun Jurnal Ilmiah Seni Budaya*, 1(212), 145–153.
- Herusatoto, B. (2008). *Banyumas; Sejarah, Budaya, Bahasa, Dan Watak* (1st Ed.). Lkis.
- Hidayat, S. (2019). *Bawor Dalam Pakeliran Banyumasan*. 1–19.
- Johny, R. H. (2010). *Studi Etiologi Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Banyumas*.

- K Khristianto, W. N. (2012). Memanfaatkan Data-Data Bahasa Yang Hilang Dalam Rekaman Humor Making Use The Recorded Language Relics In Humor Pieces. In *International Seminar "Language Maintenance And Shift Ii"*, July 5-6, 2012 I.
- Khusnul Khotimah, S. (2017). Konstruksi Identitas Kultural "Wong Ngapak" Melalui Konsumsi Media Dialek Banyumasan. *Studi Budaya Nusantara*, 1(2), 11-19. <https://doi.org/10.21776/Ub.Sbn.2017.Oo1.02.02>
- Lestari, S., Marwah, S., & Pratiwi, O. C. (2019). Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banyumas Pasca Mdgs Dalam Perspektif Regional Dan Nasional. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers*, 6(November), 1-9.
- Marwah, S., & Widyastuti, T. R. (2015). Representasi Sejarah Dan Tradisi Kuno Banyumas: Antara Peran Perempuan Dan Pelestarian Adat Oleh Negara. *Paramita: Historical Studies Journal*, 25(1), 109-117. <https://doi.org/10.15294/Paramita.V25i1.3424>
- Muflichah, H. S., & Bintoro, R. W. (2009). Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2), 125-134. <https://doi.org/10.20884/1.Jdh.2009.9.2.222>
- Pawestri, A. G. (2020). Membangun Identitas Budaya Banyumasan Melalui Dialek Ngapak Di Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 19(2), 255-266. https://doi.org/10.17509/Bs_Jpbsp.V19i2.24791
- Priyadi, S. (2007). *Cablaka* Sebagai Inti Model Karakter Manusia Banyumas. *Diksi*, 14(1), 11-18.
- Pudyadhita, T. (2012). *Representasi Perempuan Penari Dalam Kesenian Rakyat Ronggeng (Studi Semiotika Pada Film Sang Penari)* (Vol. 15, Issue 2). Universitas Diponegoro.
- Puspita, D. R., Wahyuningrat, W., Dharmas, P., & Isna, A. (2019). Pengembangan Kapasitas Penyuluhan Berbasis Masyarakat Berperspektif Gender Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. *Dinamika Journal: Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 24-36. <https://doi.org/10.20884/1.Dj.2019.1.4.931>
- Rokhman, A., Santosa, I., & Pangestuti, S. (2021). *Penggunaan Bahasa Banyumasan Berdasarkan Karakteristik Penutur Dan Kecenderungannya Di Media Digital*. 1-17.
- Suhardi, I. (2013). Budaya Banyumasan Tak Sekadar Dialek (Representasi Budaya Banyumas Dalam Prosa Karya Ahmad Tohari). *Jurnal Elektronik Wacana Etnik*, 4(1), 37. <https://doi.org/10.25077/We.V4.I1.44>
- Widianingsih Rindha. (2019). Bahasa Ngapak Dan Mentalitas Orang Banyumas: Tinjauan Dari Perspektif Filsafat Bahasa Hans-Georg Gadamer. *Jurnal Ultima Humaniora*, li(March), 186-200. https://www.researchgate.net/publication/331976186_Bahasa_Ngapak_Dan_Mentalitas_Orang_Banyumas_Tinjauan_Dari_Perspektif_Filsafat_Bahasa_Hans-Georg_Gadamer_Rindha_Widyaningsih